

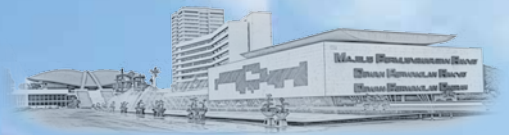


BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR: 853/III/2015

II/MARET 2015



**Otoritas Bandara Harus
Buat SOP Tangani Krisis**

Otoritas Bandara Harus Buat SOP Tangani Krisis



Tim Kunker Komisi V DPR dipimpin Wakil Ketua Yudi Widiana saat meninjau Bandara Silampari Musi Rawas, Sumsel

Terjadinya kisruh keterlambatan dan penundaan terbang yang sangat parah dalam kasus Lion Air baru-baru ini mendorong anggota DPR Fauzih H. Amro menyampaikan sikapnya agar otoritas bandar udara (bandara) harus menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) menangani krisis. Jangan sampai saat terjadi krisis mereka tidak siap. Penyiapan SOP Krisis ini disusun dengan kerja sama antara pihak air line, navigasi udara (*air nav*) dan Angkasa Pura.

“Kasus Lion Air harus menjadi pelaj-

ajaran berharga untuk membuat aturan kebandaraan, khususnya aturan standar operasional menangani krisis, ada *plan 1*, *plan 2* dan *plan 3*, sehingga kasus delay Lion Air tidak terjadi lagi di masa mendatang,” tandas Fauzih di sela-sela kunjungan kerja Komisi V DPR ke Sumsel dan Bengkulu baru-baru ini.

Terkait pernyataan Dirut AP II yang mengakui bahwa terjadinya kasus Lion Air karena penegakan hukum (*law enforcement*) yang lemah, politisi Partai Hanura ini mengatakan, justru karena itu dia mengusulkan perlunya

revisi Permenhub No.72/2011 agar ada aturan yang jelas dan *punishment* yang lebih keras sehingga *airline* yang melakukan pelanggaran akan jera.

Ketika didesak apakah sanksi kepada Lion Air cukup setimpal yang menelantarkan ribuan penumpang dan mengacaukan jadwal penerbangan lain, anggota Dewan asal Sumsel ini mengakui sudah ada rute penerbangan yang disetop. “Saya rasa sanksi itu belum memberikan efek jera, saya minta bekukan seluruh penerbangan selama sebulan,” kata Fauzih dengan menambahkan, setelah sebulan baru dievaluasi kembali, kalau layak bisa jalan lagi.

Menurutnya, sanksi pembekuan itu sudah sesuai dengan UU No.1 tahun 2009 tentang Penerbangan, dimaksudkan agar maskapai penerbangan yang bersangkutan bisa memperbaiki diri dan manajemennya bisa lebih baik.

Ditambahkan Fauzih, dalam kasus delay Lion Air diperkirakan jumlah penumpang dan ketersediaan *airline* tidak mencukupi. Seharusnya ada koneksitas antara jumlahnya penumpang dan ketersediaan pesawat, sehingga penumpang akan terlayani dengan baik dan akan merasa nyaman akan pelayanan maskapai penerbangan. (mp), foto : mastur prantono/parle/hr.

Masyarakat Karo Berharap Perhatian DPR

Erupsi Gunung Sinabung hingga kini masih meninggalkan penderitaan bagi masyarakat Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Lahan pertanian, infrastruktur, dan pendidikan rusak

dan terbengkalai. Pemerintah Kabupaten Karo menyeru tiga hal yang perlu ditangani segera, yaitu erupsi, pengungsi, dan relokasi.

Demikian terungkap dalam pertemu-

muan antara Ketua DPR RI Setya Novanto dengan Bupati serta masyarakat Karo di DPR, Kamis sore (5/3). Hadir pula Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Pertemuan ini sendiri difasilitasi alum-



Ketua DPR RI Setya Novanto menerima Bupati dan masyarakat Karo

ni ITB dari Karo. Kondisi paling memprihatinkan adalah lokasi di radius 1-3 km dari Gunung Sinabung. Sejak erupsi terjadi, masyarakat di radius 3 km tak bisa kembali ke desanya, karena bahaya erupsi masih terus berlangsung hingga kini.

Bupati Karo Terkelin Brahmna berharap agar Pimpinan DPR bisa hadir ke Karo untuk melihat dari dekat dampak bencana yang menimpa warga setempat. Dengan begitu, perhatian terha-

dap pembangunan kembali masyarakat Karo bisa segera terealisasi. Ketua DPR juga diharapkan bisa mendorong pemerintah untuk memberi perhatian lebih kepada masyarakat Karo.

Setya Novanto sendiri mengatakan, akan segera menyurati Presiden untuk memberi perhatian kembali kepada para korban erupsi Sinabung. Infrastruktur jalan dan pelabuhan perlu dibangun kembali, begitu juga lahan pertanian yang sudah lama rusak. Pen-

didikan bagi anak-anak Karo tak lupa harus kembali dibangun setelah sekian lama aktivitas pendidikan terhenti seiring bencana erupsi.

Sebelumnya Sekda Karo Sabarina Tarigan menjelaskan secara detail kerusakan wilayah Karo akibat erupsi tersebut. Terlihat infrastruktur jalan dan lahan pertanian, termasuk irigasi rusak tertimbun abu vulkanik. Rumah ibadah dan balai pendidikan rusak berat. Tercatat 34 desa terkena dampak erupsi dan 33.210 orang mengungsi. Komoditas pertanian Karo seperti jagung, kopi, jeruk, dan padi gagal panen. Pada gilirannya ekonomi Karo terganggu.

Sementara itu Fahri Hamzah menyatakan, ruang fiskal dalam APBN-P 2015 sudah tertutup untuk mengalokasikan bantuan bagi para korban Sinabung. Yang paling dekat, sambung Fahri, alokasi anggaran bisa dibahas pada APBN 2016. Namun, dana bantuan segar dari para anggota DPR masih tersedia sebesar Rp600 juta. "Persoalan Karo harus diberi perhatian komprehensif supaya kehidupan masyarakat Karo bisa kembali normal," harapnya. (mh)/
foto:rizka/parle/iv.

Ketua DPR: Pemerintah Harus Tindaklanjuti Bantuan Sinabung

Pemerintah harus segera menindaklanjuti bantuan bencana erupsi Gunung Sinabung di Sumatera Utara. Masalah pendidikan masih terbengkalai terutama bagi masyarakat Kabupaten Karo. Walau demikian, mereka tetap mengapresiasi langkah Presiden yang sudah memberi perhatian dengan mendatangi langsung lokasi pengungsian.

"Bencana Sinabung ini menjadi keprihatinan kami di DPR, terutama menyangkut pengungsian dan relokasi. Ada beberapa hal yang tentu pemerintah harus segera tindaklanjuti, salah satunya infrastruktur bagi masyarakat di sana." Demikian disampaikan Ketua DPR RI Setya Novanto saat menerima kedatangan Bupati dan masyarakat Karo di DPR, Kamis (5/2).

Infrastruktur jalan masih belum sepenuhnya direhabilitasi. Pemkab Karo sendiri perlu membangun akses jalan dan jalur evakuasi di hutan lindung milik Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Untuk itu, DPR akan memfasilitasi pengurusan izin pembukaan lahan hutan lindung untuk infrastruktur jalan di Karo.

Masalah lain, sambung Novanto, sekolah-sekolah perlu kembali dibangun sekaligus memberi banyak beasiswa kepada anak-anak usia sekolah di Karo. Selama bencana erupsi terjadi, para siswa termasuk mahasiswa tak bisa lagi



Ketua DPR RI Setya Novanto

melanjutkan pendidikannya, hampir semua balai pendidikan rusak.

Bupati Karo Terkelin Brahmna mengapresiasi sikap yang ditunjukkan Pimpinan DPR terhadap masalah yang dihadapi masyarakat Karo saat ini. Menurut Terkelin, masalah bantuan yang paling mendesak adalah perbaikan sektor perta-

nian. Tanaman pertanian di Karo mudah mati bila terkena abu vulkanik. Para petani kehilangan mata pencahariannya. Untuk menghidupkan kembali lahan pertanian, para petani

membutuhkan bantuan bibit dan pupuk. “Mudah-mudahan nanti para anggota dan pimpinan DPR bisa datang ke Tanah Karo,” harap Terkelin. (mh) foto: naefuroji/parle/hr

IPU Sepakat Tingkatkan Perlindungan HAM



Delegasi Indonesia yang dipimpin Wakil Ketua DPR Agus Hermanto foto bersama dengan Delegasi Parlemen Negara lain

Parlemen di negara-negara Asia Pasifik sepakat meningkatkan perlindungan hak asasi manusia (HAM) bagi warga negaranya lewat komitmen bersama yang dinyatakan dalam sebuah seminar internasional HAM di Manila, Filipina. Hukum tetaplah harus berbasis HAM.

Seminar yang berlangsung beberapa waktu lalu itu, merupakan hasil kerja sama antara *Inter-Parliamentary Union (IPU)*, *Office of the United Nations High Commissioner (OHCHR)*, dan Senat Filipina. Delegasi DPR RI diwakili Wakil Ketua DPR Agus Hermanto dan dua anggota BKSAP DPR RI, Vanda Sarundajang (FPDI-P) dan Nihayatul Wafiroh (FPKB).

Acara ini juga bertepatan dengan komemorasi 29 tahun Revolusi EDSA yang merupakan salah satu tonggak sejarah perjuangan HAM di Filipina. Melalui revolusi damai, rakyat Filipina menumbangkan pemerintahan Presiden Ferdinand Marcos dan menegakkan demokrasi di negaranya. Seminar ini sendiri bertajuk “*Translating inter-*

national human rights commitments into national realities: the contribution of parliaments to the work of the United Nations Human Rights Council”.

Dalam seminar tersebut terungkap, parlemen memegang peranan yang sangat besar bagi upaya perlindungan dan pemajuan HAM di tingkat nasional. Pemerintahan di masing-masing negara sangat bergantung pada kerangka hukum yang dirumuskan parlemen sebagai rujukan untuk menerapkan HAM. Tanpa hukum yang berbasis HAM, upaya pemajuan dan perlindungan HAM tidak memiliki dasar yang berarti.

Parlemen perlu memberi dukungan dengan meningkatkan kualitas produk legislasi, pengawasan, hingga anggarannya. Parlemen harus terus mengupayakan kesesuaian hukum nasional dengan komitmen internasional yang telah disepakati melalui ratifikasi instrumen-instrumen internasional terkait HAM.

Agus Hermanto dalam pertemuan tersebut menyampaikan bahwa Indo-

nesia merupakan salah satu *founding members* Dewan HAM dan sampai saat ini menjadi negara anggota Dewan HAM. Di Asia Tenggara, Indonesia telah mendorong terbentuknya *ASEAN Inter-governmental Commission on Human Rights (AICHR)* yang saat ini merupakan satu-satunya mekanisme regional pemajuan dan perlindungan HAM.

Sementara itu, Nihayatul Wafiroh yang diminta menjadi moderator dalam sesi tentang pemajuan hak-hak perempuan, menyampaikan, isu-isu seperti KDRT, hak-hak reproduksi, ketidaksetaraan gaji, kesempatan menduduki posisi pemangku keputusan, *gender stereotype*, akses terbatas bagi pemilikan properti dan aset produktif, masih menjadi tantangan bersama yang umum dihadapi perempuan di Asia Pasifik.

Vanda Sarundajang juga menyampaikan, saat ini DPR RI sedang membahas RUU Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG). Dalam perjalanannya, konsep gender yang diusung KKG mengha-

dapi tantangan konstruksi sosial yang mengakar pada keberagaman adat, budaya, dan norma yang berlaku di masyarakat. Vanda berharap dapat berbagi pengalaman dan mendapat masukan dari refleksi pengalaman parlemen negara-negara lain dalam menghadapi tantangan serupa.

Seminar ini dihadiri 18 parlemen ne-

gara-negara Asia Pasifik yang menjadi anggota IPU, yaitu Afganistan, Bangladesh, Bhutan, Fiji, Filipina, Indonesia, Iran, Kamboja, Malaysia, Maldives, Myanmar, Micronesia, Pakistan, Palau, Papua Nugini, Samoa, Selandia Baru, dan Timor Leste. Acara dihadiri pula badan-badan PBB yang membidangi HAM yaitu, OHCHR dan UN Human

Rights. Selain itu hadir pula perwakilan institusi HAM nasional dan regional, dan perwakilan *civil society organization* antara lain *Amnesty International*, *Freidrich Naumann Foundation for Freedom*, dan *Philippine Center for Islam and Democracy*. (BKSAP, mh), foto : dok. bksap/parle/hr.

Sarana dan Prasarana TV Parlemen dan Pemberitaan Perlu Ditingkatkan

Wakil Ketua BURT DPR Agung Budi Santoso mengharapkan sarana dan prasarana TV Parlemen dan Bagian Pemberitaan perlu ditingkatkan. Pasalnya sebagai unit kerja yang mempublikasikan seluruh kegiatan anggota DPR kepada masyarakat perlu dukungan peralatan yang memadai.

“Saya meninjau ruangan TV Parlemen kok ruangnya sempit kaya gitu. Padahal ini lembaga besar yang kedudukannya sama dengan lembaga Kepresidenan,” kata politisi Partai Demokrat tersebut saat meninjau ruangan kerja Bagian Pemberitaan Lantai II, Gedung Nusantara III, Rabu (4/3) siang.

Sebelumnya Pimpinan BURT ini mengadakan audiensi dengan jajaran staf TV Parlemen meminta masukan mengenai kendala dan sarana apa yang dibutuhkan supaya kinerjanya semakin meningkat

Anggota Dewan yang memasuki periode kedua di Senayan ini mengakui, saat menjadi anggota periode 2009-2014 lalu, dirinya tidak pernah menyentuh masalah-masalah yang berkaitan dengan kehumasan DPR. Baru kali ini, selaku Wakil Ketua BURT memberi perhatian pada masalah-masalah yang berkaitan dengan publikasi media masa. “Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik, karena itu saya meminta masukan Bagian Pemberitaan,” jelas Agung.

Salah satu masukan adalah kurangnya komputer di TV Parlemen dan akses internet lambat sehingga ketika mengunggah foto dan berita mengalami masalah. Seperti TV



Suasana hearing BURT dengan Crew TV Parlemen

Parlemen yang kekurangan komputer, Agung telah minta pejabat di Setjen DPR untuk segera mengirim 10 unit komputer terbaru.

Agung menambahkan, BURT ingin masukan bagaimana kebutuhan yang ideal untuk TV Parlemen dan Pemberitaan ini. Semuanya menjadi masukan, ternyata tidak hanya alatnya tetapi SDM juga harus siap. “Kita ini parlemen yang mengatur anggaran negara Indonesia, masak masalah-masalah di internal Dewan tidak diperhatikan,” ujar Agung menambahkan. (mp)/foto:naefuroji/parle/iv.

Mendagri Harus Menjadi Penengah Kemelut Gubernur DKI dan DPRD

Menanggapi kisruh antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, Anggota Komisi II Agung Widyantoro meminta Menteri Dalam Negeri untuk menjadi penengah kedua belah pihak. Selain itu, ia berharap ada solusi yang diberikan oleh Mendagri.

“Kami berharap pada saudara Mendagri untuk mengambil peran dan posisi sebagai penyelesaian akhir, sekaligus menjadi perekat dan pemersatu antara kemelut Pemerintah provinsi dengan DPRD,” kata Agung di Brebes, Jawa Tengah, saat dihubungi Parlemen via telepon, Kamis (5/03/15).

Politisi asal Dapil Jawa Tengah IX ini juga meminta kepada Mendagri untuk dapat membuat keputusan yang memberi-



Suasana Rapat Komisi II DPR RI dengan Mendagri

kan solusi kepada kedua belah pihak, bukan memihak kepada salah satu pihak, yang dapat melukai hati masyarakat. Apalagi, kemelut ini mengakibatkan penetapan APBD 2015 menjadi terganggu.

“Kami berharap kemelut ini bisa diselesaikan dalam waktu singkat sehingga roda pemerintahan dan roda perekonomian di DKI Jakarta, yang merupakan episentrum pemerintahan Indonesia, dapat berjalan dengan baik,” harap Agung.

Politisi F-PG ini juga menyampaikan apresiasinya kepada Gubernur Basuki, atau yang biasa dikenal dengan nama Ahok, yang telah berani mengambil sikap berseberangan dengan DPRD DKI dan berani mengumumkan adanya anggaran siluman.

Sebelum menjadi Anggota DPR periode 2014-2019, Agung pernah menjabat sebagai Bupati Brebes, Jawa Tengah. Ia mengakui bahwa terkadang ada euphoria DPRD yang mencoba membuat anggaran-anggaran atas nama aspirasi.

Sehingga ia memahami sekali permasalahan mengenai perbedaan pendapat antara pemerintah daerah dengan DPRD-nya.

“Tapi kami juga menyangkan kalau seorang Ahok dalam kapasitas sebagai Gubernur menyikapi persoalan-persoalan kenegaraan, pemerintahan dan soal-soal kerakyatan ini sering kali mengumbar statement yang justru melukai perasaan semua pihak. Kan ada istilah ‘mulutmu, harimaumu’. Kami menghimbau kepada saudara Ahok dengan kekritisan yang dimiliki dan idealisme yang dijunjung tinggi, sehingga tidak mudah mengeluarkan statement-statement,” saran Agung.

Terkait dengan APBD DKI Jakarta tahun 2015, Mendagri memastikan penetapan APBD paling lambat 8 Maret 2015. Pihaknya telah menerima dan mengevaluasi draf APBD yang diajukan Pemprov DKI Jakarta, dan sudah beberapa kali bertemu dengan DPRD DKI Jakarta. (sf) foto: rizka/parle/hr

Karyawan KPK Berhak Berpendapat

Anggota Komisi III DPR RI Erma Suryani Manik menilai langkah karyawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan unjuk rasa menolak pelimpahan kasus Komjen Pol. Budi Gunawan adalah sah. Namun ia berharap sikap tersebut jangan sampai menekan proses hukum yang harus dinomorsatukan.

“Karyawan KPK berhak berpendapat dan jelas kebebasan berpendapat dijamin dalam konstitusi. Tetapi jangan sampai kebebasan berpendapat menyebabkan muncul perasaan lebih tinggi dari hukum,” katanya saat dihubungi di Jakarta, Kamis (5/3/15).

Politisi Fraksi Partai Demokrat ini mengingat suka atau tidak suka ada proses praperadilan yang diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memutuskan penetapan Komjen

Pol. Budi Gunawan sebagai tersangka tidak sah. “Kita meminta semua pihak menghormati keputusan ini,” ujarnya.

Bagi wakil rakyat dari daerah pemilihan Kalimantan Barat ini keputusan pelimpahan kasus kepada Kejaksaan adalah dampak dari kalahnya KPK dalam proses praperadilan. Pelimpahan kasus menurutnya adalah bagian dari proses hukum yang harus dilewati.

Sebelumnya organisasi Wadah Pegawai KPK dalam unjuk rasanya menyampaikan tiga tuntutan. Pertama, menolak putusan Pimpinan KPK yang melimpahkan kasus BG ke kejaksaan. Kedua, meminta Pimpinan KPK mengajukan upaya hukum PK (Peninjauan Kembali) atas putusan praperadilan kasus BG. Ketiga, meminta pimpinan menjelaskan secara terbuka strategi pemberantasan korupsi.



Anggota Komisi III DPR Erma Suryani Manik

Sementara itu sejumlah mantan pimpinan KPK seperti Busyro Muqoddas, Said Zainal Abidin, dan Tumpak Hatorangan Panggabean menyarankan agar KPK mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung. (iky) foto: andri/parle/hr

Protokol Ikut Menentukan Terciptanya Parlemen Modern

DPR sedang berbenah diri menciptakan parlemen modern. Banyak aspek yang perlu diperbaiki, salah satunya adalah tata protokoler yang mengatur kegiatan di DPR. Wibawa sebuah institusi juga bisa dipengaruhi oleh pengaturan protokoler yang baik.

Demikian disampaikan Dempo Awang Yুদ্ধie usai menjadi narasumber dalam acara Diklat Protokol di DPR, Jumat (27/2). Dempo, Pejabat di Badan Diklat Kementerian Luar Negeri ini, menyambut baik adanya parlemen modern seperti yang dicanangkan Pimpinan DPR RI. Untuk itu, pro-

tokolernya harus tertata dengan baik dan dilakukan oleh pegawai-pegawai yang handal di bidang keprotokolan.

“Protokol itu mengatur agar suatu acara berlangsung nyaman, tertib, dan teratur. Saya menyambut baik DPR sekarang ini yang ingin mewujudkan parlemen modern. Saya tadi memberi dasar-dasar protokol mengenai tata tempat, mengenai bagaimana menghadiri konferensi internasional, bagaimana bila ada kunjungan parlemen asing, memberi pengalaman bagaimana mengatur acara, jamuan makan, kegiatan di bandara, dan sidang internasional,”



Suasana Diklat Protokol DPR

kata mantan Diplomat di sejumlah negara itu.

Untuk mengatur suatu acara atau menyambut kedatangan tamu asing, pengaturan tentu tidak dilakukan saat hari H saja. Butuh perencanaan dan pengaturan yang matang sebelum hari H tiba. Dan Bagian Protokol sangat menentukan kelancaran acara tersebut. Ini semua, kata Dempo, untuk membuat para tamu yang akan hadir merasa nyaman.

Selama dua hari (27-28 Februari), Diklat ini digelar untuk para pegawai protokol di lingkungan DPR. Kepala Biro Humas dan Pemberitaan Setjen DPR RI Djaka Dwi Winarko menjelaskan, kegiatan Diklat ini untuk memperbarui kembali pengetahuan tentang keprotokolatan. Seperti diketahui, DPR banyak sekali menerima kunjungan kehormatan tamu-tamu asing dan juga para pejabat negara. Bahkan, DPR juga kerap menjadi tuan rumah untuk even internasional. Untuk itu, DPR membutuhkan sentuhan tata protokol yang baik.

(mh) foto:andri/parle/hr

Ruhut Sitompul: Banyak Parpol, Sulit Jadikan Hukum Sebagai Panglima

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat, Ruhut Sitompul mengatakan banyaknya partai politik akan menyulitkan hukum sebagai panglima. Partai politik semakin banyak, maka akan banyak pihak yang melakukan bargaining politik untuk kepentingan hukum seperti saat ini.

“Ketika SBY menjadi presiden, beliau menginginkan hukum itu menjadi panglima, tapi karena banyak partai, maka sulit hal itu diwujudkan. Seharusnya, hukum sebagai panglima itu ketika Orde Baru karena hanya tiga partai (Golkar, PDIP dan PPP-red). Tapi, sampai hari ini belum terwujud,” kata Ruhut Sitompul di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (5/3), dalam acara dialektika demokrasi bertajuk ‘Bagaimana nasib kasus Komjen Budi Gunawan (BG) di Kejagung?’

Dalam acara itu selain Ruhut, hadir pula, pakar hukum tata negara UI Ganjar Laksamana, Ketua Badan Pekerja ICW Emerson Jhunto, dan kuasa hukum BG Razman Arif.

Khusus menyangkut Komjen BG kata Ruhut, Partai Demokrat selama ini memang tidak terlibat sejak awal pencalonan di mana Fraksi Demokrat meminta menunda uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR sampai paripurna DPR. Namun, DPR tetap melanjutkan.

“Kami malah tidak ikut mengunjungi rumah Komjen BG. Tapi, apa pun yang terjadi saat ini baik KPK, Polri dan Kejagung harus diselamatkan dan diperkuat,” ujarnya.

Sementara itu, Ganjar Laksamana juga mengakui jika carut-marutnya hukum saat ini pangkalnya adalah politik dan ruhnya adalah kekuasaan. “Ternyata hukum masih menjadi alat kekuasaan dan selama ini politik yang menjadi panglima, maka situasi akan seperti ini terus-menerus. Padahal, penegakan hukum itu sederhana, yaitu harus taat azas dan memahami bahasa Indonesia yang benar,” jelasnya.

Karena itu menurut Ganjar, dalam seleksi hakim KPK itu seharusnya mencari orang biasa. “Baik dalam kehidupan sehari-hari, dari pakaian, makan, tidur dan keseharian lain-



Anggota Komisi III DPR Ruhut Sitompul dalam acara Dialektika Demokrasi

nya. Kita memang bukan mencari malaikat. Tapi, menemukan kesalahan itu berbeda dengan mencari-cari kesalahan. Kalau kondisi ini terjadi terus-menerus maka akan makin kacau,” tambahnya.

Di tempat yang sama, Emerson Juntho menyatakan ragu akan komitmen Plt Ketua KPK Ruki, karena selama puluhan tahun sudah mengabdikan kepada kepolisian. Apalagi pelimpahan kasus itu tak ada dasar hukumnya, yang seharusnya dilanjutkan oleh KPK malah dilimpahkan ke Kejagung. “Mana komitmen Plt KPK itu. Harusnya melanjutkan dan melawan kepolisian, tapi malah menyerah,” tuturnya.

Ruki dinilai Emerson, tidak pantas memimpin KPK, ditambah Kejagung dari NasDem, sehingga rakyat wajar meragukan obyektifitas penanganan hukum tersebut. “Keputusannya nanti, pasti tak murni hukum tapi akibat tekanan politik dan potensi untuk menghentikan kasus BG itu sangat besar. Selama ini koruptor bagi Kejagung dan kepolisian itu justru menjadi orang istimewa,” tambahnya.

(nt/sc)/foto:naefurodji/parle/hr

Anggaran Rumah Aspirasi 150 juta Per Anggota

Anggaran program Rumah Aspirasi (RA) bagi para anggota DPR RI ditetapkan sebesar Rp 150 juta per anggota per tahun dalam APBN-P 2015. Namun, anggaran RA belum terealisasi hingga kini, karena masih dalam proses pembahasan di pemerintah.

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Agung Budi Santoso mengungkapkan hal tersebut di ruang kerjanya, Selasa (3/3). Paling cepat anggaran tersebut baru bisa dicairkan pada April tahun ini. "Rumah Aspirasi sebagai media untuk mendekatkan anggota dewan dengan konstituennya dalam fungsi legislasi dan pengawasan. Tentu hal ini untuk menampung aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya," kata Agung.

Aspirasi yang disampaikan ke RA akan diperjuangkan di DPR. Anggaran RA, sambung Agung, bukan Rp 1,6 miliar seperti diberitakan beberapa media. "Anggaran itu bukan untuk membeli rumah, tapi menyewa rumah berikot kursi, mesin fax, komputer, penjaga, dan lain-lain," jelas politisi Partai Demokrat ini. BURT sendiri yang mengurus kerumahtanggaan anggota dewan, telah mengusulkan anggarannya dalam pembahasan APBN-P 2015.



Wakil Ketua BURT DPR RI Agung Budi Santoso

"Kami di BURT harus bekerja berdasarkan UU. Dan UU mengatakan bahwa setiap anggota harus memiliki Rumah Aspirasi," tegas Agung lagi. Seperti diketahui, dasar hukum RA diatur dalam Pasal 234 ayat (3) huruf (j) UU MD3 hasil revisi tahun 2014. Secara eksplisit RA diatur pula dalam Tatib DPR, Pasal 1 ayat (18) yang berbunyi: "Rumah Aspirasi adalah kantor setiap Anggota sebagai tempat penyerapan aspirasi rakyat yang berada di daerah pemilihan Anggota yang bersangkutan."

Secara lebih detail, Pasal 213 Tatib DPR menjelaskan, untuk menjalankan fungsi RA setiap anggota dibantu oleh tenaga ahli dan staf administrasi. Anggarannya dibebankan kepada DPR sesuai pedoman pengelolaan anggaran di DPR. "Setelah dananya cair, kita akan membuat pertanggungjawaban yang transparan, yang akuntabel, karena harus dipertanggungjawabkan dengan sistem aturan keuangan yang baik, supaya bisa diterima oleh publik bahwa ini betul penggunaannya seperti ini," ujar Agung.

Bila setiap anggota menerima dana RA sebesar Rp 150 juta per tahun, itu berarti dana yang diterima per bulan hanya sekitar Rp 12,5 juta. Dana itu nantinya dimanfaatkan selain untuk sewa rumah, juga untuk mengupah penjaga rumah, serta membayar iuran keamanan dan kebersihan di lokasi setempat. "Jadi, sekali lagi kita tidak membangun rumah. Setelah pembahasan APBN-P selesai, baru bisa direalisasikan anggarannya."

Kehadiran RA nantinya sangat dibutuhkan Dewan, karena para Anggota DPR tidak setiap hari ada di dapilnya. Dengan adanya RA di tengah-tengah masyarakat, siapa pun bisa menyampaikan aspirasi itu ke RA. Dan RA nanti akan meneruskannya kepada setiap anggota, selanjutnya dilaporkan kepada DPR dan dibahas serta diperjuangkan oleh komisi-komisi dengan mitra kerja pemerintah. (mh), foto : naefurodji/parle/hr.

Dewan akan Bentuk Pansus Terkait Melambungnya Harga Beras

Melambungnya harga beras yang drastis sampai 30% sekarang ini seharusnya menjadi *warning* bagi pemerintah dalam menjaga kedaulatan pangan. Kenaikan 30% itu sudah pada tingkat membahayakan bagi suatu negara dan ancamannya lebih berbahaya dari nuklir.

Apalagi kasus beras ini hampir terjadi setiap tahun, terus berulang-ulang dan sistemik. Karena itu, DPR akan segera membentuk Pansus beras dan pupuk terkait dugaan adanya kartel atau mafia beras dan pupuk, yang menyulitkan petani selama ini.

"Saya melihat ada tangan-tangan yang tidak terlihat untuk pengkondisian melakukan impor, setiap menjelang panen raya pada Maret dan April mendatang. Untuk itu, agar harga gabah dan beras tidak jatuh di musim panen raya itu, maka pemerintah harus tolak impor beras," tegas Ketua Kelompok Komisi IV (Kapoksi) F-PKB DPR RI Daniel Djohan dalam diale-



Anggota Komisi IV DPR Daniel Djohan dalam Acara Dialektika Demokrasi

ktika demokrasi “Melambungnya harga beras, siapa yang bermain?” bersama anggota Komisi VI DPR RI dari F-Golkar Muhammad Sarmuji dan pemerhati pertanian Jan Prince Permata di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (26/2/2015).

Menurut Daniel, yang harus dilakukan oleh Bulog adalah menindak oknum pemerintah dan swasta juga operasi pasar untuk mengetahui jumlah stok beras. Hanya saja operasi pasar itu tidak main-main, sehingga tidak mengandalkan pengusaha besar. Sebab, pengusaha besar itu sebagian merupakan bagian dari kartel, yang mengendalikan harga. “Bulog harus andalkan Kopas, yaitu koperasi pasar dan kios-kios kecil di pasar itu tak mungkin akan menimbun beras,” ujarnya.

Persoalannya lanjut Daniel, pedagang kecil itu kalau minta ke depot logistik (Dolog) berasnya malah ditahan, sehingga mereka kembali ke pasar induk yang harganya sudah dikendalikan oleh pengusaha besar. Karena itu Dolog harus mendistribusikan stok beras itu ke pedagang kecil dan harganya harus dikendalikan oleh Bulog. “Kalau harga sudah ditetapkan, pengawasnya kepala pasar yang sehari-hari bertugas di pasar, dan yang melanggar harus mendapat sanksi, maka harga dan distribusi beras aman,” tambahnya.

Thailand kata Daniel, sudah menawarkan beras per Kg Rp 4.000,- tapi itu beras afkiran. Karena itu kata Daniel, kalau ada oknum Bulog yang melakukan penyimpangan, maka Dirut Bulog yang baru Ibu Lenny Sugihat, bisa membereskan berbagai penyimpangan itu. Bulog mendapat PMN Rp 3 triliun, sedangkan pupuk mendapat subsidi Rp 32 triliun.

“Jadi, seharusnya Bulog langsung bertanggungjawab kepada Presiden RI, yang bisa mensubsidi petani dari hulu untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Harga beras pun tidak bisa diserahkan ke pasar, karena pangan sebagai kebutuhan dasar yang harus dikendalikan oleh negara,” jelas Daniel.

Sementara Sarmuji mengakui, melambungnya harga beras saat ini tidak masuk akal, karena stok di Bulog menumpuk. Di Surabaya Selatan untuk wilayah Mojokerto, Jombang, dan sekitarnya misalnya, stok beras di Bulog itu bahkan cukup untuk 18 bulan. Tapi, kenapa harga beras terus naik? Padahal, Jatim sebagai daerah penyumbang 20% kebutuhan beras

nasional. Itu berarti ada pihak-pihak yang memainkan harga. “Ya, pedagang besar, pemain besar. Tapi, soal siapa? Intelejen tahu itu,” jelas politisi Golkar itu.

Kenapa bisa dimainkan, karena menurut Sarmuji, fungsi Bulog tidak jalan. Apalagi menjelang panen raya ini seharusnya stok beras itu dikeluarkan akhir Desember 2014 lalu. “Bukannya akhir Februari 2015 ini, sehingga saat panen raya pada Maret nanti Bulog bisa membeli gabah atau beras dari petani, sekaligus bisa melakukan stabilisasi harga. Hanya saja Bulog tak bisa melakukan operasi pasar kecuali diminta oleh Menteri Perdagangan RI,” tuturnya.

Mestinya kata Sarmuji, ketika harga beras itu naik sampai 10%, maka pemerintah langsung melakukan operasi pasar, namun karena fungsi Bulog tidak berjalan, maka harga beras terus melambung. Padahal, Bulog bisa membuat outlet di pasar-pasar yang sudah memiliki jalur distribusi. “Jadi, kita memang harus membenahi Bulog. Untuk itu, kita mendukung Pansus beras maupun pupuk yang akan dilakukan lintas komisi DPR RI nanti,” pungkasnya.

Sedangkan, Prince Permata menegaskan, yang sulit itu kejujuran, dimana harga itu indikator yang paling tepat untuk mengukur kejujuran tersebut adalah harga. Anehnya Presiden Jokowi yang katanya rajin blusukan, ternyata kebobolan harga beras.

“Jadi, kalau dengan 8 juta ton beras nasional akan aman, tapi buktinya pemerintah kecolongan. Saya khawatir ini bukan soal Bulog, kartel atau mafia beras, melainkan soal kapasitas pemerintah. Mengapa? Buktinya, sewaktu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Presiden, hal itu bisa diatasi. Maka, ini berarti problem ketidakmampuan negara dalam mengantisipasi harga terkait kedaulatan pangan sebagaimana dijanjikan Jokowi sebagai Nawacita dan Trisakti Bung Karno,” ungkapnya.

Pada prinsipnya kata Permata, pemerintah itu harus seperti pedagang, dia harus hadir di sawah maupun di pasar agar mengetahui betul kondisi perberasan yang sesungguhnya. Baik mengenai stok, menjelang panen raya, harga dan sebagainya. (sc), foto : riska arinindya/parle/hr.

KUNJUNGAN KERJA DPR KE BERBAGAI DAERAH



Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya W. Yudha

DPR Dukung Pemda Desak Newmont Bangun Smelter di NTB

Komisi VII DPR mendukung langkah Pemerintah Daerah NTB mendesak PT Newmont untuk membangun smelter di NTB bukan di daerah lain. Di sisi lain, DPR juga mendukung langkah Pemda untuk mengambil alih divestasi saham di Perusahaan tersebut.

“Kita mengharapkan Pemerintah Daerah jadi mayoritas karena dengan demikian akan ada hak untuk menempat-

kan Direksi terutama Direksi yang punya posisi strategis dalam pengambilan keputusan itu krusial dalam posisi divestasinya,” ujar Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya W. Yudha saat Kunker bertemu dengan Wakil Gubernur NTB Muh Amin, baru-baru ini.

Menurut Satya, Komisi VII DPR juga mengharapkan langkah itu dapat dilakukan di Freeport. “Dengan demikian ada kemampuan kita mengabsorb dari divestasi itu, agar bisa masuk konsorsium agar kita memiliki kewenangan,” terangnya.

Dia menambahkan, persoalan smelter itu kerap dipeleketkan seperti raw material. Khusus Newmont, memang *value grade* mereka sudah cukup tinggi sehingga itu memberatkan mereka untuk membangun smelter.

“Disitu nanti akan ada pemurnian dan pengolahan. Jadi argumentasi membangun smelter itu jadi mahal padahal mereka sudah mengupgrade 70 persen nilai *valuenya*,” jelasnya.

Menurutnya, kita semua ingin menjadi tuan rumah di dalam negeri itulah esensi dari divestasi. “Kalau BUMD harus memulai dari awal itu resiko tinggi jadi mulai muncul ide soal divestasi tadi. Kalau divestasi dijalankan BUMN dan BUMD tidak maju itu aneh jadi harus ditinjau ulang UU Minerbanya, karena itu, kita ingin divestasi Newmont ini dapat dinikmati oleh Pemerintah daerah nantinya,” paparnya.

Anggota DPR dari Nasdem Kurtubi mengatakan, dirinya merupakan salah satu pendukung Smelter yang dibangun di daerah pertambangan. “Karena melalui cara ini pembangunan menjadi semakin merata, dan memperkecil kesenjangan,” jelasnya.

Tentang pertambangan Newmont, jelasnya, dirinya tidak meragukan lagi kehadirannya sangat penting bagi perekonomian di daerah tersebut. “Ini Sudah menjadi kebijakan pemerintah agar Smelter dapat dibangun. Papua yang rencana di Gresik akhirnya bisa dibangun di daerah asal,” paparnya. (Si) foto: naefuroji/parle/hr

Anggota Dewan Minta Pimpinan Daerah Kreatif

Anggota Komisi V DPR Musa Zainudin meminta pimpinan daerah termasuk Kepala Satuan Pelayanan Bandara untuk kreatif menggali dana bagi pengembangan pembangunan daerahnya. Untuk pembebasan lahan, jangan minta ke Pemda tetapi ke Pusat.

“Masalah pembebasan lahan untuk keperluan perluasan landasan pacu (*run way*) Bandara Silampari, terminal serta apron sebaiknya diajukan langsung kepada Kemenhub, jangan minta-minta kepada pemerintah daerah,” tegas Musa Zainudin di sela-sela Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Lubuklinggau dan Musirawas, belum lama ini sebagai rangkaian kunjungannya ke Sumsel dan Bengkulu.

Menurutnya, anggaran pembebasan lahan nilainya cukup besar, jangan lagi dibebankan kepada Pemda yang anggarannya terbatas. “Menteri Perhubungan pak Jonan pasti ngerti lah. Hendaknya jangan lagi masalah pembebasan tanah dibebankan kepada pemda. Setelah aset Bandara diserahkan, nanti dibuat *masterplan* yang pasti biaya pengembangan bandara memakan dana sangat besar,” untkap dia.

Musa Zainudin didampingi sejumlah anggota Dewan lintas Fraksi dua diantaranya dari Sumsel yakni Hana Gayatri dan Fauzi Amro menegaskan kembali, Pemkab dan Pemkot jangan dimintai uang untuk pengembangan Bandara, mintalah dengan Kementerian Perhubungan, uang mereka tidak cukup



Anggota Komisi V DPR Musa Zainudin berdialog dengan Kepala Satuan Pelayanan Bandara

karena keperluan rakyat,” jelasnya.

Komisi V DPR, lanjut politisi PKB ini, akan membantu untuk memberikan masukan kepada Kementerian agar biaya pengembangan segera diberikan apabila aset bandara yang saat ini dimiliki dua daerah diserahkan kepada Kemenhub.

“Dibantu Rp 500 miliar bagaimana pak Makmur Sitorus selaku Kepala Satuan Pelayanan Bandara Silampari, cukup tidak. Nanti kita akan bantu ngomong kepada Kementerian Perhubungan. Jangan lagi minta dana pengembangan bandara kepada daerah, kasihan

Lubuklinggau dengan Musirawas,” jelas Musa.

Bupati Musi Rawas Ridwan Mukti yang hadir dalam kesempatan ini meminta dukungan Komisi V DPR untuk mengembangkan bandara Silampari yang merupakan bandara alternatif bagi masyarakat Musi Rawas dan Lubuklinggau. Sekarang ini baru bisa didarati pesawat Aviastar dan hanya seminggu dua kali yakni Selasa dan Kamis. “Ke depan bisa didarati pesawat lain seperti Garuda, Sriwijaya Air atau City Link,” tambah Ridwan. (mp), foto : mastur prantono/parle/hr



Dunia Penerbangan Indonesia Banyak Bolongnya



Ketua Tim Kunker Komisi V DPR Yudi Widiana Adia

Masalah penerbangan menjadi konsen Komisi V DPR dengan dibentuknya Panitia Kerja (Panja) Keselamatan, Keamanan dan Peningkatan Kualitas Penerbangan. “Komisi V melihat dunia penerbangan kita banyak bolongnya sehingga harus direformasi mulai dari sektor hulu. Kita minta Kemenhub mulai bekerja menata regulasi,” kata Wakil Ketua Komisi V DPR Yudi Widiana Adia kepada wartawan di sela-sela memimpin kunjungan kerja ke Sumsel dan Bengkulu, baru-baru ini.

Menurut politisi PKS ini, regulasi perlu segera dilakukan bukan hanya sebagai pencitraan dan membuat Humas yang baik sehingga terjadi dialog yang terbuka dengan Kemenhub dan elemen yang terkait dengan dunia penerbangan.

Dalam reses masa persidangan II tahun 2014-2015, Tim Komisi V menitikberatkan pemantauan pembangunan infrastruktur, selain jalan trans Sumatera, pembangunan jalur ganda (*double track*) KA di Sumsel, juga berdialog dengan jajaran Otoritas Bandara Wilayah VI, Direksi AP II serta

meninjau langsung perluasan Bandara Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II, Bandara Salampari di Kabupaten Musi Rawas dan Bandara Fatmawati Soekarno di Bengkulu.

Anggota Komisi V Sukur Nababan mengharapkan, agar seluruh sistem penerbangan berjalan dengan baik. Salah satu rekomendasi Komisi V adalah, dengan lingkup kerja yang sangat luas sementara SDM terbatas dan kualitas yang belum menunjang serta masalah navigasi adalah problem penerbangan kita.

“Kita perlu perbaiki, dengan fokus bagaimana memastikan semua sistem regulasi bisa berhasil dengan baik, sehingga resiko penerbangan keamanan dan keselamatan harus diatas segala-galanya,” tambah Sukur.

Kepada Tim Komisi V, jajaran Otoritas Penerbangan Wilayah V mengakui, di daerah hanya bisa menerima keadaannya saja sementara ijin penerbangan ditentukan oleh pusat, dan selama ini kalau ada *airline* yang bermasalah tidak ada *law enforcement*. Kalau *airline* bermasalah diberi sanksi akan jera dan tak mau melakukan lagi. Kasus seperti terjadi lagi dan berulang sementara tidak ada sanksi, pencabutan.

Masalahnya menurut dia, sudah muncul dari menteri yang lama ke menteri yang baru. “Contohnya masalah narkoba, ada hukuman mati, selesai. Karena itu kalau Menhub memberi sanksi tegas, maka otoritas bandara termasuk yang ada di daerah akan melaksanakan,” ujarnya.

Pajabat Otoritas Bandara Wilayah VI yang juga mantan pilot ini menegaskan, pernah meng-*grounded* 40 pilot yang *over time* selama 4 bulan sehingga banyak pesawat tidak terbang. Ditegaskan kembali, tindakan tegas bagi *air line* yang melanggar yang berdampak pada terlantarnya penumpang, harus ada keberanian. “Jadi sekali lagi, ini kewenangan pusat, di daerah tinggal melaksanakan,” ujarnya menambahkan. (mp), foto: mastur prantonopar/le/hr

DPR Dukung Penjualan Listrik Newmont kepada Warga NTB

Komisi VII DPR mendukung penjualan daya listrik Newmont yang lebih sekitar 10 MW kepada PLN Nusa Tenggara Barat (NTB). Sehingga dapat mencegah pemadaman bergiliran yang kerap terjadi di Provinsi ini.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi VII DPR Kurtubi dari Fraksi Partai Nasdem saat pertemuan Tim Kunker Komisi VII DPR yang dipimpin Ketua Komisi VII Kardaya Warnika, dengan General Manager PLN Wilayah NTB Kusnanto, di NTB baru-baru ini.

Menurut Kurtubi, melalui cara ini tentunya sangat baik bagi reputasi Newmont ditengah masyarakat NTB. “Ini akan baik bagi Newmont dalam hal penilaian atau persepsi positif di mata masyarakat NTB,” jelasnya.

Menurutnya, pemadaman yang kerap terjadi di Taliwang, berdasarkan penjelasan PLN NTB mereka hanya butuh 5 MW saja.

“Berdasarkan penjelasan PLN mereka hanya butuh 5 MW. Hal itu hanya pada jam tertentu saja untuk meng-

hindari pemadaman listrik di Sumbawa,” ujarnya.

Dia menegaskan, DPR mendukung penuh Newmont apabila dapat menjual listriknya kepada PLN NTB yang kebutuhan tertinggi itu hanya pada pukul 18.00- 20.00 malam.

Walaupun penjualan listrik itu bukan merupakan *core bisnis* dari PT Newmont. Namun ke depan, PT Newmont juga dapat meningkatkan kapasitas pembangkit PLTU mereka. “Jadi tidak hanya menjual 5 MW, bisa saja sema-



Tim Kunker Komisi VII DPR ke Newmont, NTB

cam *independen power to user* apabila menguntungkan,” jelasnya.

Hal ini, lanjutnya, akan berlanjut dalam jangka panjang. Artinya apabila SDA habis maka *project listrik* terus jalan.

General Manager PLN Wilayah NTB Kusnanto mengatakan, PLTU Unit 1 Jeranjang masih dalam proses persiapan dan akan masuk ke sistem Lombok pada bulan Maret atau April 2015. “Jadi sebelum PLTU itu masuk sistem Lombok maka listrik akan terus rentan di Lombok,” jelasnya.

PLN juga masih menunggu penambahan daya di PLTU Taliwang sebesar 14 MW dan selesai beroperasi pada Juni 2016. Karena itu, untuk jangka pendek PLN akan bernegosiasi dengan Newmont untuk menyewakan daya sebesar 10 MW kepada PLN. (Si), foto : sugeng irianto/parle/hr

Anggota Komisi X Berharap Hasil Karya SMK Dapat Didistribusikan



Tim Kunker Komisi X DPR RI saat mengunjungi bengkel otomotif SMK 9 Mataram

Anggota Komisi X DPR RI, Moreno Suprpto berharap hasil karya siswa SMK dapat didistribusikan secara profesional. Hal tersebut diungkapkannya saat Komisi X mengunjungi beberapa SMK di NTB belum lama ini.

“Saya lihat kemampuan dan ketrampilan adik-adik siswa SMK ini cukup baik. Ditunjang dengan peralatan yang canggih dan modern, saya yakin hasil karya siswa SMK tidak kalah dibanding buatan pabrik,” jelas Moreno saat mengunjungi bengkel otomotif SMKN 9 Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Hal itu menurut Moreno terlihat dari kepandaian siswa SMK merakit ulang mobil dan motor. Bahkan siswa juga

telah mampu mengoperasikan peralatan yang terbilang cukup modern, seperti alat *sporing* dan *balancing* baik untuk motor maupun mobil. Untuk itu pihaknya sangat mengapresiasi penyediaan peralatan bengkel otomotif oleh pihak sekolah. Berdasarkan informasi Kepala Sekolah SMKN 9 Kota Mataram, peralatan bengkel otomotif tersebut berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima sekolah tersebut dari pemerintah.

Meski demikian dikatakan Politisi dari Daerah Pemilihan Jawa Timur V ini, ia berharap hasil karya siswa SMK ini pun dapat dijual atau didistribusikan secara profesional. Bahkan bukan tidak mungkin sekolah juga dapat bekerjasama dengan pihak swasta untuk ikut mendistribusikan hasil karya siswa tersebut. Sehingga selain akan muncul sebuah kebanggaan dan kepercayaan diri, juga bisa menghasilkan tambahan pendapatan bagi sekolah dan siswa.

“Seharusnya hasil karya siswa SMK ini bisa didistribusikan atau paling tidak bekerjasama dengan pihak swasta untuk mendistribusikan atau melibatkan siswa di bidang industri otomotif. Sehingga bisa lebih melatih siswa, serta dapat menumbuhkan kebanggaan tersendiri dalam diri siswa. Selain itu tentunya akan menambah pendapatan sekolah yang akhirnya bisa digunakan untuk meningkatkan peralatan yang ada,” papar anggota DPR yang sekaligus sebagai Pembalap nasional ini.

Sementara ketika mengunjungi SMKN 5 Kota Mataram, ia sangat mengapresiasi tatkala diketahui tidak sedikit motif kain dan desain baju yang dihasilkan oleh siswa SMKN 5 Kota Mataram ini yang telah dipasarkan oleh pihak sekolah. (Ayu) foto: ayu/parle/hr

Industri Pakaian Jadi Harus Berbenah



Wakil Ketua Komisi VI DPR Heri Gunawan

Industri Pakaian Jadi dalam negeri harus berbenah menghadapi tantangan persaingan dengan negara Asean dan Cina, terutama menjelang pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean 2015. Pemerintah perlu menyiapkan langkah strategis mendorong pertumbuhan dan melakukan sinkronisasi proses dari hulu ke hilir.

“Industri *ready to wear* di dalam negeri perlu berbenah,

proses dari hulu ke hilir harus saling tersinkronisasi dengan solid sehingga lebih efisien dan efektif dari segi waktu maupun biaya. Dengan begitu, harga jual pun bisa bersaing,” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Heri Gunawan di Jakarta, Jumat (27/2/15).

Ia menyambut baik pelaksanaan kegiatan Indonesia Fashion Week (IFW) 2015 yang diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan. Harapannya IFW 2015 dapat mendongkrak kreatifitas industri dalam negeri dan menjangkir kerja sama bisnis dengan mitra manca negara.

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menyayangkan masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk memakai dan mencintai produk dalam negeri. Penyebabnya antara lain varian produk mode yang masih terbatas dan kurang cepat mengadaptasi tren sehingga agak sulit menemukan *brand* lokal yang sebanding dengan *brand* luar. Kalaupun ada harganya justru lebih mahal.

“Kita minta instansi terkait melakukan koordinasi, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Usaha Kecil dan Menengah, serta Badan Standarisasi Nasional agar sinergi menghadapi persaingan antar negara yang semakin ketat,” demikian Heri. (*spy/iky*), foto : *supriyanto/parle/hr*

Pemerintah Harus Lebih Serius Tekan Harga Beras

Kenaikan harga beras di pasaran sudah memasuki rekor tersendiri, naik hingga 30 persen dan sudah berlangsung hampir dua bulan. Publik mulai bertanya-tanya apa yang sebenarnya telah dilakukan pemerintah, karena belum pernah ada kenaikan selama dan setinggi ini.

“Upaya pemerintah harus lebih serius, operasi Bulog harus lebih cepat dan bukan sekedar main-main untuk menstabilkan harga. Kenaikan harga yang berlarut-larut akan menjadi ruang gelap para spekulasi dalam memainkan harga beras di pasaran dan menahan produksi harga beras,” kata Wakil Ketua Komisi VI Heri Gunawan saat dihubungi di Jakarta, Jumat (27/2/15).

Pantauan wakil rakyat dari daerah pemilihan Jabar IV ini, harga beli beras di penggilingan sudah mencapai lebih dari Rp9.500. Kondisi ini dapat memicu inflasi dan akan semakin menyulitkan masyarakat. Lebih jauh menurutnya melonjaknya harga beras tidak berdampak positif bagi petani.

“Petani kita sekarang ini sedang menghadapi cuaca ekstrim dan tingginya biaya produksi yang menjadi kendala pasokan beras nasional. Belum lagi, mahalnya biaya-biaya non-produksi seperti penggilingan, transportasi dan lain-lain,” tandas politisi FP Gerindra ini.

Berlarutnya kenaikan harga beras semakin memperkuat kesan pemerintah tidak cukup siap menghadapi kondisi ini. Publik dapat menilai pemerintah tidak punya disain dan



Wakil Ketua Komisi VI DPR Heri Gunawan saat meninjau gudang Bulog di Ambon

mekanisme yang jelas tentang ‘Kebijakan Perberasan Nasional’.

“Saya berharap pemerintah masih berupaya dengan keras menurunkan harga, jangan sampai menyerah apalagi kalau *ujug-ujug* melakukan impor beras atas nama stabilitas harga beras nasional. Jangan sampai,” demikian Heri. (*iky*) foto: *ical/parle/hr*

Imam Suroso Kritik Ruang Pertemuan Tak Ada Foto Presiden

Anggota Komisi IX DPR RI Imam Suroso mengeritik ruang pertemuan di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan yang tidak memasang foto Presiden dan Wakil Presiden. Masalah kecil ini luput dari perhatian Pemprov Sulawesi Selatan (Sulsel).

Kritik Imam disampaikan kepada Wakil Gubernur Sulsel yang memimpin pertemuan, Senin (23/2). Kritik Anggota F-PDI Perjuangan itu, sontak membuat semua yang hadir tertawa dan bertepuk tangan. Hanya ada simbol burung Garuda yang tergantung di tengah-tengah ruang pertemuan. Padahal, di tempat resmi seperti itu, harusnya sudah dilengkapi atribut simbol negara.

“Ini harus jadi perhatian Pemprov. Masa foto Pak Jokowi dan Pak Jusuf Kalla tidak dipasang,” katanya dalam pertemuan. Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Numang mengklarifikasi persoalan foto tersebut. Katanya, Pemprov Sulsel belum sempat menerima foto Presiden dan Wakil presiden dari Sekretariat Negara sebagai rujukan resmi foto Kepala Negara. Apalagi, ruang pertemuan tersebut baru selesai diperbaiki.

Pihaknya berjanji akan segera memasang foto Presiden dan memperhatikan hal kecil yang sesungguhnya penting. “Saya minta maaf atas hal ini,” akunya.



Anggota Komisi IX DPR Imam Suroso

Kritik Imam disampaikan saat Komisi IX DPR melakukan kunjungan kerja ke Sulsel dan bertemu dengan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo yang tak lama mengikuti pertemuan. Kunjungan itu untuk menggali informasi layanan kesehatan dan ketenagakerjaan di Sulsel. (mh), foto : husein/parle/hr

Perlu adanya Perubahan Mindset di PT Dok dan Perkapalan Surabaya



Tim kunker Komisi VI DPR saat meninjau PT Dok

Anggota Komisi VI DPR Adang Darajatun (Fraksi PKS) mengatakan, perlu adanya perubahan mindset dari PT Dok dan Perkapalan Surabaya agar

memiliki kemampuan bersaing dengan industri perkapalan lainnya.

“Memang masih ada persoalan hukum dimana pemeriksaannya ini

terkait persoalan teknis jadi harus betul-betul dituntaskan dengan pihak kejaksaan,” ujar Adang usai pertemuan dengan jajaran Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya baru-baru ini.

Menurutnya, persoalan adanya dana *bridging* sebelum PMN keluar juga harus dibicarakan dengan pihak terkait seperti BPK dan Kejaksaan. “Artinya jangan sampai jajaran Direksi terkena persoalan dikemudian hari terkait persoalan PMN ini nantinya,” katanya.

Sementara Wakil Ketua Komisi VI DPR Azam Azman Natawijana mengatakan, kinerja PT Dok dan Perkapalan Surabaya masih belum membaik, bahkan terlihat adanya ketidaktertiban manajemen yang mengelola BUMN tersebut. “Ini dampaknya macam-macam seperti kondisi keuangan yang mempengaruhi profesionalitas manajemen,” tambahnya. (Si), foto : sugeng irianto/parle/hr.

Pemberian PNM Harus Tingkatkan Kinerja dan Setoran Deviden

Anggota Komisi VI DPR Lili Asjudiredja mengapresiasi Menteri BUMN Rini Soemarno yang mengambil keputusan memberikan Pinjaman Modal Negara (PMN) kepada BUMN, sebab sebelumnya BUMN hanya dituntut menyetor laba kepada Pemerintah. Di lain pihak pemerintah tidak pernah memperbaiki atau merehabilitasi mesin-mesin dan peralatan lain yang menyebabkan kinerjanya tidak meningkat.

Di sela-sela mengikuti kunjungan kerja spesifik ke Sumatera Selatan baru-baru ini, Menteri Rini sekarang memberikan PNM cukup besar. Tujuannya tidak lain mendukung rencana besar Presiden seperti swasembada pangan, dimana disitu terkait kepentingan petani (pupuk), Sang Hyang Seri, kemudian swasembada gula (PTPN Gula), juga program besar tol laut. Ini baru pertama kali, dalam jum-



Anggota Komisi VI DPR Lili Asjudiredja

lah besar dan banyak BUMN, dulu paling hanya satu atau dua BUMN yang disuntik permodalannya.

“Sekarang ini pemberian PNM jumlahnya banyak dan sekaligus. Masalahnya setelah pemberian PMN ini, bagaimana meningkatkan kinerja. BUMN tidak hanya dituntut setoran deviden, tetapi bagaimana meningkat-

kan kinerja dan setoran deviden juga meningkat,” tandas politisi dari Dapil Jabar ini.

Dari 35 BUMN yang diusulkan, Komisi VI (Februari lalu) lalu memutuskan menyetujui suntikan dana PMN kepada 27 perusahaan dengan berbagai catatan dan rekomendasi.

Kucuran dana PMN sebesar Rp 37,276 triliun akan diberikan dalam bentuk tunai (cash) sebesar Rp 36,07 triliun dan nontunai Rp 1,206 triliun. Ketetapan itu didapat setelah sempat dipangkas oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR menjadi Rp 39,92 triliun dari pengajuan awal sebesar Rp 48 triliun.

Komisi VI DPR juga menolak permohonan suntikan PMN untuk tiga BUMN. Tiga BUMN tersebut, yakni PT Bank Mandiri Tbk, PT Rajawali Nusantara Indonesia, dan PT Jakarta Lloyd. (mp) foto: neafurodji/parle/hr

Pemprov Sulsel Perlu Sosialisasi Pencegahan Penyakit



Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan perlu melakukan sosialisasi pencegahan berbagai penyakit kepada masyarakat, agar anggaran kesehatan tak selalu habis untuk pengobatan saja. Penghematan anggaran pengobatan bisa dialihkan untuk melengkapi peralatan kesehatan yang sangat kurang.

Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani (F-Nasdem) menyampaikan hal tersebut usai mengikuti rangkaian kunjungan kerja ke Sulsel dengan meninjau dua rumah sakit di Makassar. “Pemprov

Sulsel harus mulai melakukan sosialisasi promotif preventif terhadap perlunya menjaga kesehatan agar anggaran kesehatan tidak habis hanya untuk pengobatan saja,” katanya, baru-baru ini.

Dua rumah sakit yang sempat dikunjungi adalah RS Wahidin Sudirohusodo dan RS Labuan Baji. RS Wahidin yang ditetapkan sebagai rumah sakit rujukan utama untuk kawasan Indonesia Timur, belum memiliki peralatan yang lengkap walau lahannya sudah cukup luas. Rumah sakit ini rencananya akan diperbarui dengan membangun gedung bertingkat.

Sementara RS Labuan Baji, kondisinya tampak lebih memprihatinkan dengan kerusakan gedung di sana-sini. Gedungnya merupakan peninggalan Belanda yang dibangun tahun 1938. Pasiennya membludak ditambah alat kesehatannya juga semakin berkurang. Rumah sakit ini membutuhkan anggaran lebih untuk merenovasi gedung dan melengkapi peralatannya.

“Untuk bisa melayani masyarakat In-

donesia Timur tentu tidak cukup hanya dengan memperbaiki rumah sakit. Sebaran rumah sakit pratama dan kesiapan infrastruktur, alat kesehatan, dan SDM perlu ditingkatkan,” paparnya.

Menurut Irma, wilayah antarkabupaten di Sulsel sangat berjauhan, sehingga para pasien yang dirujuk ke rumah sakit di Makassar butuh waktu sehari-hari untuk sampai ke rumah sakit rujukan. Untuk itu, perlu ada fasilitas ambulan yang handal dan dokter jaga khusus sebagai langkah preventif untuk menangani para pasien yang dirujuk dari berbagai daerah di sekitarnya.

Dari informasi yang didapat di RS Wahidin, sambung Irma, ada tiga besar kasus yang sering ditangani, yaitu kanker serviks, mame, dan kecelakaan akibat perkelahian. “Di sini penting pula mensosialisasikan kepada masyarakat untuk menjaga kesehatan alat reproduksinya, menjaga makanan, dan menstabilkan emosi,” ujar politisi dari dapil Sumsel II ini. (mh), foto: husein/parle/hr.

BLKI Makassar Cetak Pekerja Mandiri

Lewat pelatihan kerja yang intensif dengan sarana yang memadai, Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Makassar berkeinginan mencetak para tenaga terampil yang mandiri. BLKI Makassar merupakan pusat latihan kerja di kawasan Indonesia timur.

Komisi IX DPR RI berkesempatan mengunjungi balai ini, Selasa (24/2), untuk melihat dari dekat para peserta pelatihan yang sedang merakit berbagai peralatan elektronik hingga otomotif. Tim Kunker Komisi IX DPR yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IX Syamsul Bachri meninjau satu per satu ruang pelatihan dan berbincang langsung dengan para peserta pelatihan.

Muhammad Akbar Kepala BLKI Makassar menjelaskan, usai mengikuti program pelatihan kerja, dunia industri banyak menyerap para tenaga terampil dari BLKI yang dipimpinnya. Sebagian lagi malah membuka usaha sendiri seperti perbengkelan dan servis peralatan elektronik. Para instrukturanya berpendidikan S1 dan S2 dari dalam dan luar negeri.

“BLKI Makassar berdiri tahun 1977 dan diresmikan langsung oleh Presiden Soeharto. Waktu itu masih bernama Pusat Latihan Tenaga Kerja, hasil dari kerja sama Pemerintah Indonesia



Wakil Ketua Komisi IX Syamsul Bachri saat meninjau BLKI Makassar

dengan Pemerintah Jepang,” ungkap Akbar. Keberadaan BLKI ini, lanjut Akbar, bisa menekan angka pengangguran yang masih tinggi di Makassar.

Syamsul Bahri yang memimpin delegasi Komisi IX sangat mengapresiasi BLKI tersebut. Ia menilai, sarana gedung dan instrukturanya cukup memadai. “Ini perlu terus ditingkatkan agar lahir para tenaga terampil dan

mandiri,” katanya.

Tim Kunker Komisi IX yang turut meninjau BLKI Makassar ini adalah Hamid Noor Yasin (F-PKS), Imam Suroso (F-PDI Perjuangan), Daniel Lumban Tobing (F-PDI Perjuangan), Andi Fauziah Pijiwatie Hatta (F-PG), Djoni Rolindrawan (F-Hanura), dan Ayub Khan (F-PD). (mh) foto: husen/parle/hr

Larangan Rapat di Hotel Berdampak Bagi Pariwisata Kota Mataram



Wakil Ketua Komisi X DPR Ridwan Hisyam

Kebijakan pemerintah melarang PNS mengadakan rapat di hotel ternyata berdampak serius bagi kelangsungan usaha perhotelan di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Aspirasi ini disampaikan Dinas Pariwisata Kota Mataram kepada Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI. Para pengusaha perhotelan di wilayah ini berharap kebijakan ini ditarik kembali.

“Dinas pariwisata Kota Mataram meminta kami (DPR) untuk mendesak MenPAN RB segera mencabut larangan rapat di hotel bagi PNS. Larangan itu telah mempengaruhi ekonomi pariwisata daerah. Penghasilan hotel berkurang dan akhirnya pajak yang dibayarkan kepada negara pun berkurang. Hal itu tentu sangat mempengaruhi PAD (Pendapatan Asli Daerah),” ujar Ridwan Hisyam, Wakil Ketua Komisi X usai menerima aspirasi di Kantor Walikota Mataram, Selasa (25/2/15).

Ia menambahkan kondisi ini bisa mempengaruhi upaya

meningkatkan pemasukan negara dari sektor pariwisata yang saat ini sedang dilakukan pemerintah. Peningkatan anggaran pariwisata seratus persen dari Rp1 triliun menjadi Rp2,3 triliun yang juga didukung DPR bisa menjadi sia-sia.

Bicara pada kesempatan yang sama anggota Komisi X dari Fraksi PPP, Reny Marlinawati menyebut pelarangan rapat di hotel oleh MenPAN RB juga telah menghambat berjalannya program-program lainnya. Salah satunya program pelatihan guru yang tentunya membutuhkan tempat yang luas untuk bisa menampung peserta pelatihan yang jumlahnya tidak sedikit.

Dalam pertemuan ini, Tim Kunker Komisi X diantaranya Popong Djundjuna (FPG), Moreno Suprpto, Ida Bagus Putu Sukarta (FPGerindra), Junico Siahaan (FPDIP), Nurhasan Zaidi (FPKS), Kresna Dewanata P (FP Nasdem) juga membahas upaya Kota Mataram untuk menjadi tujuan wisata baru lewat berbagai program pariwisata. Hal ini diharapkan dapat mendukung target pariwisata nasional yakni mendatangkan 20 juta wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara ke berbagai obyek wisata di Indonesia. (Ayu/iky) foto: ayu/parle/hr

Sekolah Jangan Paksaan Kurtilas



Tim Kunker Komisi X DPR saat meninjau Perpustakaan Provinsi

Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi X DPR RI ke Provinsi Nusa Tenggara Barat mendapat masukan penting terkait program Kurikulum 2013 (Kurtilas). Dalam pertemuan dengan Forum Kepala Sekolah se-Kota Mataram terungkap 41 sekolah sampai saat ini masih menerapkan Kurtilas.

Anggota Komisi X Reny Marlinawati meminta sekolah tidak memaksakan diri menerapkan Kurtilas. Sejumlah permasalahan di lapangan seperti kurangnya buku pelajaran pendukung,

minimnya pelatihan guru diperkirakan akan mempengaruhi hasil akhir.

“Selamat untuk 41 sekolah yang sudah bisa menerapkan Kurtilas selama tiga semester dan masih berlanjut hingga sekarang. Namun saya berharap jangan memaksakan diri karena cepat atau lambat Kurtilas itu juga akan tetap dilaksanakan secara bertahap pada 2017 nanti,” katanya dalam pertemuan di Kota Mataram, NTB, Rabu (25/2/15).

Terkait kurangnya ketersediaan

buku-buku pelajaran, Reny menjelaskan dari total APBN 2015 Rp2 ribu triliun lebih, dua puluh persennya atau sekitar Rp400 triliun merupakan anggaran pendidikan. Sayangnya dari jumlah tersebut, yang dikelola oleh Kemendikbud hanya 57 triliun, sisanya tersebar di kementerian dan lembaga lainnya yang bukan mitra kerja Komisi X.

“Saya tidak tahu kebutuhan anggaran untuk buku di sekolah di Mataram karena pastinya kebutuhan sekolah akan meningkat seiring peningkatan kebutuhan hidup lainnya. Dan Apakah dana BOS sebesar Rp1 juta untuk SD dan Rp1.250.000 untuk SMP dan SMA itu cukup. Oleh karena itu saya perlu data lengkap sebenarnya berapa kebutuhan buku untuk sekolah di Mataram,” ungkap Reny.

Anggota Fraksi PPP ini mengingatkan pemerintah daerah terutama Wakil Walikota Mataram Mohan Roliskana yang hadir dalam pertemuan itu, untuk segera mengambil langkah cepat mengatasi kekurangan buku sekolah tersebut. (Ayu/iky) foto: ayu/parle/hr

PLN Dianggap Tidak Kompeten

Komisi VII DPR RI menilai Perusahaan Listrik Negara (PLN) tidak kompeten dalam menangani permasalahan listrik yang menjadi kebutuhan bagi masyarakat Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi VII DPR Mulyadi selaku Ketua Tim Kunker kepada wartawan usai melakukan pertemuan dengan Gu-

bernur Kepri HM Sani beserta jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri, di Tanjung Pinang, Rabu (25/2).

“Karena Direksi yang hadir dalam rapat ini tidak ada kaitannya dengan persoalan yang akan kita tinjau. Jadi, saya menilai PLN ini sangat tidak kompeten dalam menangani persoalan itu, dan mengirim orang yang tidak ada kaitannya dengan persoalan yang

akan dibahas dan sangat bobrok sekali,” kata Mulyadi.

Seperti diketahui, Komisi VII DPR melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kepri guna melihat kondisi permasalahan sumber daya alam energi, riset, teknologi, dikti, dan lingkungan hidup serta membahas permasalahan listrik yang dikelola oleh PLN yang menjadi polemik di masyarakat.

Politisi dari Partai Demokrat itu mengatakan atas ketidakkompetenan PLN dalam memenuhi kebutuhan listrik masyarakat Kepri, pihaknya mengungkapkan bahwa Komisi VII akan membentuk Panitia Kerja (Panja). Sementara terkait banyaknya pembangkit listrik yang tidak beroperasi, Mulyadi menilai, tidak menutup kemungkinan ada mafia didalamnya.

“Sudah dikasih izin pengoperasian pembangkit listrik, tapi tidak dijalankan, dan izin yang diberikan itu untuk apa. Bahkan, kalau ada masalah mengenai pembangkit sampai tujuh tahun dibiarkan saja. Jadi, saya tidak mengerti terhadap PLN ini,” ujarnya.

Selain itu, menurut Mulyadi, setiap DPR melakukan kunjungan ke beberapa daerah di Indonesia, selalu ditemukan masalah dengan PLN. “Maka, kita akan rapat gabungan dengan Komisi III bersama aparat penegak hukum untuk membahas masalah ini. Siapa yang



Tim Kunker Komisi VII DPR saat meninjau PLTGU Tanjung Uncang Batam

terlibat dalam masalah PLN ini harus ditindak tegas dan diproses sesuai hukum yang berlaku,” imbuhnya. (nt) foto: nita/perle/hr

Pengembangan Wisata Danau Toba Perlu Perencanaan



Anggota Komisi X DPR Wiryanti Sukamdani

Anggota Komisi X DPR RI Wiryanti Sukamdani meminta kepada Pemerintah Daerah kawasan Danau Toba harus saling berkoordinasi dan memiliki perencanaan dalam mengembangkan potensi wisata Danau Toba. Destinasi ini dinilai memiliki potensi wisata, nilai historis, potensi keilmuan dan keindahan yang ada.

“Pemerintah Daerah kawasan Danau Toba harus memiliki perencanaan dalam pembagian peran, sehingga akan jelas yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat,” kata Wiryanti, saat pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi X dengan Pemerintah Daerah di Parapat, Sumatera Utara,

Selasa (24/2/15).

Wiryanti menambahkan perjalanan panjang dari Kota Medan menuju Danau Toba yang ditempuh selama 4 jam adalah kendala tersendiri. Itulah sebabnya keindahan Danau Toba yang berada pada peringkat 9 dari 10 destinasi wisata utama Indonesia hanya dikunjungi 131 ribu wisatawan.

Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, dan DPR menurutnya harus menyelesaikan persoalan bagaimana mendekatkan Danau Toba sebagai tujuan wisata dengan kota-kota besar terutama Medan.

“Komisi X akan membahas bersama dengan pemerintah membuat langkah-langkah segera mendorong Danau Toba sebagai destinasi pariwisata penting di dunia, sehingga bentuk pembagian peran antara pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten. Selanjutnya Komisi X akan menindaklanjuti kebijakan fiskal di tingkat nasional,” ujarnya.

Wisata Danau Toba sebagai wisata alam atau ekoturisme dikembangkan dengan memperhatikan empat faktor pendukung untuk menunjang pariwisata yaitu infrastruktur, perlu dikembangkan pesawat ampibi yang dapat mendarat di air, sehingga turis dapat langsung mendarat di perairan Danau Toba.

Selain itu, juga perlu ditingkatkan pemeliharaan lingkungan hidup, oleh karena itu mulai dari sekarang harus membuat perda-perda yang mewajibkan perusahaan-perusahaan di sekitar kawasan untuk memelihara kelestarian lingkungan. Pertemuan Tim Kunker Komisi X ini dihadiri oleh pejabat daerah di sekitar Danau Toba yaitu Bupati Samsosir, Bupati Karo, dan Bupati Humbang Hasundutan. (as/iky) foto:agung/parle/hr



DPR Tinjau PLTGU Tanjung Uncang Batam

Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi VII DPR RI melakukan peninjauan proyek PLTGU Milik PLN Tanjung Uncang di Batam, Kamis, (26/2). Kedatangan kali ini untuk melihat secara langsung kemajuan proyek tersebut demi kelancaran kebutuhan pasokan listrik untuk masyarakat.

Sebelumnya, di Batam, Tim Kunker yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VII Mulyadi telah melakukan berbagai pertemuan dengan mitra kerjanya, salah satunya dengan PLN. Dalam pertemuan mencuat harapan agar perusahaan setrum negara ini dapat meningkatkan kemampuannya memasok energi.

“Masalah energi masih menjadi tantangan di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) terutama peningkatan kebutuhan dan konsumsi yang tidak diimbangi secara proporsional oleh ketersediaan dan peningkatan pasokan energi,” jelas Mulyadi.



Tim Kunker Komisi VII DPR meninjau pembangkit listrik PLN di Tanjung Uncang

Turut hadir dalam kunjungan kerja pengawasan ini, Daryatmo Mardianto (FPDIP), Awang Ferdian Hidayat (FPDIP), Falah Amru (FPDIP), Ramson Siagian (F.Gerindra), Saiful Bahri Ruray (FPG), Bambang Hariadi (F.Gerindra), Mat Nasir (FPD), Achmad Fariel (FPPP), dan Achmad Amins (F.Nasdem). (nt/iky) foto: nita/parle/hr

Komisi V Dukung Persiapan Sumsel Tuan Rumah Asean Games



Ketua Tim Kunker Komisi V DPR Yudi Widiana Adia bertukar cinderamata dengan Gubernur Sumsel

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Yudi Widiana Adia mengatakan pihaknya mendukung visi Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin untuk mengharumkan nama Indonesia melalui Asean Games yang akan digelar tahun 2018. Ini menjadi pencontohan bagi daerah-daerah lain untuk memajukan bangsa melalui event internasional.

Hal itu di kemukakannya kepada wartawan usai memimpin Tim Kunker Komisi V menggelar pertemuan dengan Gubernur Sumsel dan jajarannya, di Gedung Griya Agung Kantor Gubernur Palembang, Rabu (25/2/15).

Menurut Yudi bentuk dukungan Komisi V adalah dengan

memperjuangkan aspirasi yang disampaikan gubernur antara lain menyangkut pembangunan jalan tol, infrastruktur jalan, fly over, pembangunan jalur kereta api double track dan perluasan Bandara Sultan Mahmud Baddarudin II (SMB II) serta pembangunan perumahan.

“Niat dan visi Gubernur Sumsel didukung Komisi V DPR dengan datang dan melihat persiapan pembangunan proyek dimaksud,” jelas Yudi. Palembang bersama Jakarta akan menjadi tuan rumah penyelenggara pesta olah raga empat tahunan Asian Games 2018. Rencananya, upacara pembukaan akan digelar di Jakarta dan penutupan di Palembang.

Dalam memantau persiapan itu Tim Kunker mengadakan pertemuan dengan kepala kantor otoritas Bandar Udara wilayah VI, PT. Angkasa Pura II, kemudian mendengar ekspose pembangunan infrastruktur bidang Bina Marga dilanjutkan dengan peninjauan program pembangunan underpass Simpang Patal.

Selain itu program pengerukan alur/kolam Pelabuhan Boom Baru Palembang dan peninjauan ke Jembatan Musi II, serta ekspose program penyelesaian double track kereta api Trans Sumatera di wilayah Sumatera Selatan, dilanjutkan peninjauan program pengembangan Stasiun Kereta Api Kertapati.

Ditanya mengenai tindak lanjut pembahasan proyek tersebut Ketua Komisi V mengatakan mitra kerja sudah mendengar dan DPR akan membahas draf rencana tahun 2016 yang akan mulai dibahas dengan pemerintah pada bulan April dan Mei pada pembicaraan pendahuluan RAPBN 2016. (mp, ds, hi) foto: mastur/parle/hr

Kunjungan Pengawasan Berbingkai Pantun

Kunjungan Spesifik Komisi VI ke Medan, Sumut yang dipimpin Wakil Ketua Heri Gunawan fokus pada agenda memeriksa kesiapan BUMN dalam menerima PMN (Penyerahan Modal Negara). Kunjungan pengawasan ini menjadi hangat ketika rapat diwarnai dengan beragam pantun penuh makna.

Ketika menyambangi PT Pelindo belum lama ini, BUMN yang mengelola pelabuhan terbesar di bagian barat pulau Sumatera ini, pembawa acara langsung menyambut dengan sebuah pantun yang mendapat sambutan meriah peserta rapat. Anggota Tim Kunjungan dari FPPP Mukhlisin mengapresiasi pantun sambutan tersebut dan menurutnya pantun itu harus dijawab. "Saya usul Pak Tifatul menjawabnya," ujar dia.

Permintaan ini langsung didukung seluruh anggota tim. Tifatul Sembiring, mantan Menkominfo yang memang dikenal jago pantun langsung bersiap. "Kalau bukan setetes tinta. Akan kugubah sebaht puisi. Kalau bukan karena cinta. Tak kan hadir disini," tutur dia disambut meriah peserta rapat.

Rapat kemudian bergulir dengan isu utama membahas upaya Pelindo I mengelola Pelabuhan Belawan sebagai gerbang utama Indonesia di bagian barat Pulau Sumatera. Direktur Bisnis Syahputra Sembiring menyampaikan sejumlah harapan diantaranya meminta dukungan Komisi VI agar kewenangan pengelolaan alur pelabuhan Belawan bisa dilimpahkan dari Kementerian Perhubungan kepada Pelindo.

Rapat kemudian menjadi serius ketika sejumlah capaian dan program kerja PT Pelindo mendapat sorotan anggota



Tim Kunjungan Spesifik Komisi VI mendengar paparan Direktur Bisnis PT. Pelindo I

dewan diantaranya Nasril Bahar dari Fraksi PAN dan Ihsan Yunus dari FPDIP. Rapat kemudian menjadi cair ketika Ketua Tim Kunjungan Heri Gunawan kembali melengkapi paparannya dengan pantun.

"Apa tanda Kota Belawan. Lampu kuning di sebelah kanan. Apa tanda kita berkawan. Fungsi pengawasan kita jalankan," ujar dia, disambut tepuk tangan hangat peserta rapat. Kunjungan Spesifik Komisi VI ini ditutup dengan memantau langsung ke lapangan sejumlah proyek yang sedang dilaksanakan perusahaan plat merah yang pada tahun ini berketetapan hati untuk tidak menerima PMN dari pemerintah. (iky) foto:

ibnur/parle/hr

Komisi VI Beri Jempol untuk Pelindo I

Keberhasilan Badan Usaha Milik Negara - BUMN PT Pelindo I untuk tidak terlibat dalam perebutan anggaran PMN (Penyerahan Modal Negara) dinilai sebagai hal positif. Kondisi ini menunjukkan perusahaan plat merah ini sudah dapat membangun kemandirian.

"Kami memberikan apresiasi kepada Pelindo I perihal alasan tidak meminta PMN. Kita sungguh beri apresiasi karena itu berarti tidak *menetek* lagi kepada pemerintah. Kita berikan jempol kepada Pelindo yang mampu mandiri dalam konteks pengembangan daripada Pelindo ini," kata anggota Tim Kunjungan Spesifik Komisi VI Nasril Bahar dalam pertemuan dengan pimpinan PT Pelindo I di Pelabuhan Belawan, Medan, Sumut, Beberapa waktu lalu.

Pada bagian lain wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumut III ini memberikan apresiasi atas keberhasilan program Bina Lingkungan PT Pelindo I



Tim Kunjungan Spesifik Komisi VI meninjau fasilitas pelabuhan yang dikelola PT Pelindo I di Medan, Sumut

yang menurutnya sudah sesuai dengan BUMN. Bicara pada kesempatan yang sama

anggota Komisi VI dari Fraksi PPP Iskandar Dzulkarnain Syaichu meminta penjelasan terkait upaya Pelindo I melakukan pembangunan Terminal Muti Purpose di Pelabuhan Kuala Tanjung, Sumatera Utara yang membutuhkan biaya investasi sebesar Rp4,99 triliun.

Secara khusus ia juga mengingatkan agar perusahaan BUMN ini dapat konsisten di jalur bisnis inti perusahaan. Wakil rakyat dari daerah pemilihan Ja-

tim X ini juga meminta paparan tentang kondisi anak perusahaan PT Pelindo I dengan prospek bagus dan yang masuk kategori gagal.

Dalam penjelasannya Direktur Bisnis PT Pelindo I Syahputra Sembiring mengatakan salah satu alasan mengapa perusahaannya tidak mengajukan PMN adalah karena saat ini posisi kas perusahaan cukup memadai Rp1,27 triliun. Selain itu kegiatan pengembangan pelabuhan juga dilakukan melalui siner-

gi BUMN dan dukungan perbankan.

“Kita bangga pengembangan Kuala Tanjung sampai hari ini tidak menggunakan dana asing,” kata dia. Dalam kesempatan kunjungan tersebut Tim Kunjungan Spesifik Komisi VI yang dipimpin Heri Gunawan memantau sejumlah fasilitas Pelabuhan Belawan diantaranya jalur khusus kereta api untuk mengangkut minyak sawit (CPO).

(iky) foto: ibnur/parle/hr

Kualanamu Harus Berbenah

Tim Kunjungan Spesifik Komisi VI DPR RI mengkritisi sejumlah layanan di Bandara Kualanamu Medan, Sumut yang masih jauh dari standar bandara internasional. Komisi yang salah satu tugasnya mengawasi kinerja BUMN ini meminta PT Angkasa Pura II sebagai pengelola melakukan pembenahan.

“Saya pernah kehilangan tab (komputer tablet) saya di Medan. Waktu itu ditaruh di bagasi, bagaimana sebenarnya pengawasan barang-barang penumpang?” kata anggota Komisi VI Tifatul Sembiring dalam rapat dengan Direksi PT Angkasa Pura II di Medan, Sumut, belum lama ini.

Pada bagian lain Politisi Fraksi PKS ini juga mengkritisi harga tiket kereta api bandara yang terlalu mahal Rp100 ribu. Menurutnya ini tidak membantu upaya mengurangi kepadatan lalu lintas dari dan menuju bandara.

Kritikan lain datang dari anggota Komisi VI dari FPAN Nasril Bahar yang mempertanyakan slogan Angkasa Pura II yang ingin membuat penumpang tersenyum. Ia kemudian memaparkan pengalamannya ketika menemukan salah satu toilet bandara yang berbau tidak sedap.

“Bagaimana bisa tersenyum kalau toilet bandara baunya seperti itu, saya rasa itu masalah *exhaust* yang tidak memadai,” papar wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumut III ini.

Pada kesempatan meninjau langsung fasilitas bandara ia juga mempertanyakan kualitas keramik yang terpasang di bandara. Keramik yang berwarna kusam, baret dan pinggirannya pecah baginya sudah dapat disimpulkan bahwa keramik terpasang bukan kualitas terbaik.

Sementara itu Ketua Tim Kunjungan Spesifik Heri Gunawan meminta PT Angkasa Pura tidak tergoda untuk mencoba-coba mengembangkan usaha yang tidak sesuai dengan *core*



Tim Kunjungan Spesifik Komisi VI meninjau fasilitas Bandara Internasional Kualanamu, Medan, Sumut

businessnya. BUMN ini harus fokus pada pelayanan jasa kebandaraan dan berkomitmen menguatkan sinergi perusahaan BUMN dengan pola kerja sama saling menguntungkan dan menguatkan sesuai kompetensi masing-masing.

Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II Andra Agussalam menyatakan legawa menerima kritikan dari anggota Komisi VI dan berjanji melakukan perbaikan. Terkait aksi kriminal di area penanganan bagasi penumpang pihaknya sudah melakukan sejumlah tindakan.

“Sejumlah fasilitas yang memiliki spot gelap sudah kita beri penerangan tambahan dan dilengkapi CCTV. Khusus di Bandara Kualanamu ini saja kita sudah memasang 300 kamera CCTV,” tutur dia. (iky) foto: ibnur/parle/hr

Komisi VI Berdialog dengan Empat PTPN di Sumut

Tim Kunjungan Spesifik Komisi VI DPR RI melakukan pertemuan dengan empat BUMN bidang perkebunan yang membuka lahan di Sumatera Utara yaitu PTPN II, III, IV dan VII. Sejumlah persoalan mengemuka dan perlu solusi

segera agar perusahaan negara ini dapat memberikan kontribusi lebih baik bagi kemajuan ekonomi nasional.

“Kunjungan spesifik kita ingin melihat langsung fakta di lapangan seperti PTPN II yang berada tidak jauh dari

Kota Medan asetnya berkurang terus, ada yang dijarah masyarakat karena lokasinya strategis dekat Bandara Internasional Kualanamu. Ini harus kita carikan solusinya,” kata Ketua Tim Kunjungan Heri Gunawan, usai rapat di



Tim Kunjungan Spesifik Komisi VI usai berdialog dengan manajemen empat PTPN

Medan, Sumut, beberapa waktu lalu.

Anggota Komisi VI dari Fraksi Partai Demokrat Ambar Tjahyono menilai salah satu beban berat PTPN II adalah bisnis gula yang setiap tahun selalu merugi. Keberadaan dua pabrik gula

yang tidak produktif, serta perkebunan yang luasnya kurang memadai membuat perusahaan kesulitan sehingga setiap tahun terus merugi.

“Kalau memang bisnis pergulaan masih terus merugi dan sulit untuk

bangkit memang lebih baik manajemen menyampaikan secara resmi kepada pemerintah untuk beralih ke bidang usaha lain,” tandas dia. Terkait permasalahan PTPN II Ambar dan Iskandar Syaichu dari FPPP sepakat untuk mendalam dalam RDP khusus di Jakarta.

Sementara itu anggota Komisi VI dari Fraksi PAN Nasril Bahar menyoroti dilema holding PTPN III yang sesuai PP no.72/2014 menjadikan PTPN VII, IX, X, XI dan XII sebagai anak usaha. Sebagai penerima anggaran Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp3,5 triliun BUMN di bidang perkebunan ini kesulitan berbagi kepada perusahaan di bawahnya.

“Dalam peraturan perundang-undangan status anak usaha BUMN tidak layak mendapatkan PMN karena posisinya bukan sebagai BUMN. Ini yang perlu kita carikan payung hukum terutama bagi anak usaha PTPN III ini,” demikian Nasril. (iky) foto: ibnur/parle/hr

Komisi X Pertanyakan Mangkraknya Pembangunan Wisata Mandalika, Lombok

Komisi X mempertanyakan mangkraknya proses pembangunan kawasan pariwisata Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat yang sudah dimulai sejak tahun 1990. Hal tersebut terungkap saat Kunjungan Kerja Komisi X ke Provinsi NTB belum lama ini.

“Kami mendengar proyek pembangunan kawasan pariwisata Mandalika ini sudah dimulai sejak tahun 90-an namun sampai saat ini belum juga selesai. Belakangan kami mendengar bahwa DPR bersama pemerintah pusat telah mengalokasikan dana PMN (Penyertaan Modal Negara) sebesar 250 Miliar. Kami berharap dengan adanya PMN proyek ini dapat segera terselesaikan. Mengingat potensi alam yang dimiliki daerah ini sangat bagus,” jelas Ketua Komisi X DPR RI, Teuku Riefky Harsya.

Sementara itu anggota Komisi X, Rinto Subekti mengatakan mengingat keindahan alam yang dimiliki daerah Mandalika, Lombok Tengah NTB ini yang tak kalah dibanding daerah pariwisata lainnya, seperti Bali, Labuan Bajo dan sebagainya, maka sejatinya tanpa bantuan PMN pun kawasan wisata ini bisa terselesaikan. Karena ia memastikan tidak sedikit investor swasta yang ingin berperan dalam kawasan ini.

Ke depan dikatakan Riefky, pihaknya akan mengundang pihak ITDC (*Indonesia Tourism Development Corporation*) yang notabene merupakan BUMN pengembang pariwisata di Indonesia. Pasalnya selama ini ITDC sebagai BUMN hanya berdiskusi dengan Komisi VI sebagai mitra kerja BUMN secara keseluruhan.



Tim Kunker Komisi X DPR saat mengunjungi proyek pembangunan pariwisata Mandalika

Sementara terkait industri pariwisata yang menjadi program ITDC belum pernah didiskusikan sebelumnya dengan Komisi X yang menaungi bidang pariwisata. Sehingga belum ada yang benar-benar mengawasi program tersebut. Hal inilah yang diduga membuat proyek pembangunan kawasan pariwisata Mandalika ini mangkrak hingga bertahun-tahun. (Ayu)/foto:rahayu/parle/hr

RUU Perlindungan TKI Berantas Mafia Buruh Migran

Anggota Komisi IX DPR Djoni Rolindrawan mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) akan memberikan payung hukum perlindungan TKI untuk menghadapi mafia buruh migran yang marak terjadi dan seakan tak pernah teratasi sampai saat ini.

“Sehingga tidak ada lagi cerita sedih yang sering kita dengar terhadap nasib pahlawan devisa kita di luar negeri sana,” kata Djoni Rolindrawan dalam diskusi forum legislasi ‘Revisi UU Perlindungan TKI’ di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (3/3).

Selain Djoni, dalam diskusi itu, hadir sebagai pembicara Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah, Direktur Mediasi dan Advokasi Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI), Teguh Hendro Cahyono, dan Pemerhati Sosial Ketenagakerjaan, Juliaman Saragih.

Djoni mengungkapkan bahwa RUU Perlindungan TKI sudah masuk ke dalam RUU Prioritas tahun 2015. “Sehingga pada saat pembahasannya nanti, Komisi IX akan membahas hal-hal yang substansial,” ujarnya.

Ia mengakui regulasi penempatan TKI di luar negeri mesti direvisi. Perlindungan dan penempatan TKI mesti menjadi perhatian penuh pemerintah. Bukan menjadi rahasia umum, TKI menjadi penyokong devisa bagi negara. Namun fakta di lapangan, pelayanan terhadap TKI terbilang buruk. Penegakan hukum menjadi jalan keluar atas persoalan klasik yang terus berulang tiap tahunnya. “Jadi kalau sebaik apa pun UU nya, dan tidak dilaksanakan ditegakkan hukum akan sia-sia,” ujarnya.

Dikatakan Djoni, materi penegakan hukum bakal masuk dalam revisi UU No.39 Tahun 2004. Pemalsuan dokumen TKI akan dikenakan sanksi terhadap pelakunya. Ia berharap penegakan hukum ditegakkan oleh aparat penegak hukum. Sebaliknya, jika hukum tak ditegakkan, negara seolah tak hadir.

“Karena di setiap birokrasi bermain, begitu juga dengan swasta bermain. Selama pelayanan publik masih sep-



Anggota Komisi IX DPR Djoni Rolindrawan dalam acara Forum Legislasi

erti itu yah akan seperti itu. Jadi penegakan hukum yang mesti ditegakkan, tanpa penegakan hukum yang keras tak akan berhasil,” ujarnya.

Politisi Partai Hanura itu menyarankan agar perlindungan TKI mulai dari tahap rekrutmen, misalnya memberikan pendidikan. Dengan begitu, jasa para TKI dapat digunakan secara profesional di luar negeri dan tak dipandang sebelah mata. Lebih jauh dikatakan Djoni, beberapa kali komisinya menggelar rapat dengar pendapat dengan *stakeholder* untuk menghentikan pengiriman pembantu rumah tangga ke luar negeri.

“Tetapi dikembalikan ke Indonesia, mau dikemanakan akan menganggur. Pemerintah kebingungan, di sini saja banyak yang mengganggu. Saya setuju menghentikan pengiriman pembantu atau TKI. Jokowi juga inginnya menghentikan, cuma kan masalahnya lapangan pekerjaan,” katanya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah menilai pemerintah seolah menutup mata terkait carut marutnya pelayanan penempatan TKI ke luar negeri. Faktanya, masih banyak pemalsuan dokumen para TKI yang di bawah umur. Pengawasan yang dilakukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dinilai minim.

Anis berpandangan, pemerintah tak memiliki pengawasan melekat terhadap penempatan TKI. TKI di luar negeri kerap mendapat perlakuan yang tidak baik. “AS (Abraham Samad-red) kan dikenakan tersangka pemalsuan dokumen, dalam sehari terdapat ribuan TKI yang berangkat dan banyak pemalsuan dokumen. Harusnya Polri cari itu pemalsuan,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Direktur Mediasi dan Advokasi Deputi Bidang Perlindungan BNP2TKI, Teguh Hendro Cahyono, mengatakan posisi pemerintah adalah memberikan jaminan dan perlindungan terhadap penempatan TKI di luar negeri. Menurutnya, pihaknya banyak menerima laporan dugaan pemalsuan dokumen TKI. “Pemalsuan dokumen seperti inilah masih berada di luar kemampuan kami BNP2TKI,” ujarnya.

BNP2TKI, kata Teguh, mengetahui adanya pemalsuan dokumen setelah mendapat laporan dari pelapor. Meski pun BNP2TKI memiliki cabang di berbagai daerah, faktanya pengawasan memang minim. Terlepas dari persoalan itu, BNP2TKI fokus mempersiapkan pengawasan yang ketat di lapangan. Itu sebabnya, BNP2TKI memberikan pendidikan dan pelatihan bagi petugas di lapangan dalam rangka memberikan pelayanan prima untuk memperkuat pengawasan. (nt/sc), foto : andri/parle/hr.



Tim Kunker Komisi VII DPR RI dipimpin Wakil Ketua Mulyadi meninjau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bintang (kiri), Selasa (24/02) dan ke PLTGU Tanjung Uncang di Batam (kanan), Kamis (26/02) Foto: Nita/Parle/HR



Tim Kunjungan Kerja Komisi X saat mengunjungi Perpustakaan dan rumah adat Sasak Sade NTB, (24-28/02)Foto: Ayu/Parle/HR



Diskusi Forum Legislasi dengan tema RUU Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Selasa (03/03) Foto: Andri/Parle/HR